



BERITA RESMI STATISTIK

No. 80/08/Th. XXIX, 5 Agustus 2026



Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2026

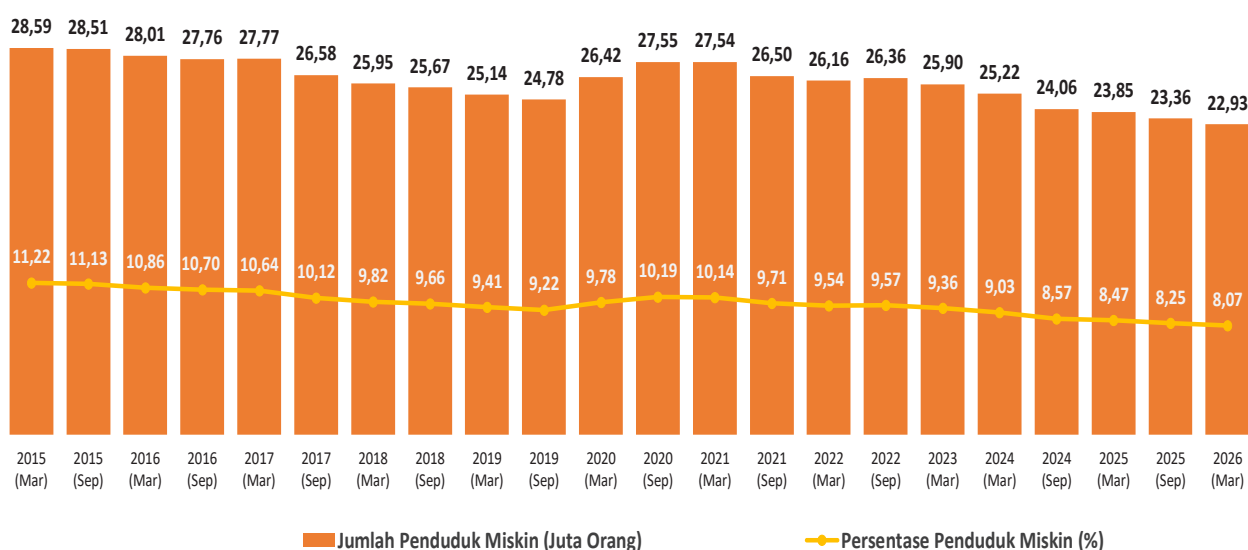
- Persentase Penduduk Miskin Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen.



- Persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen, menurun 0,18 persen poin terhadap September 2025 dan menurun 0,40 persen poin terhadap Maret 2025.
- Jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 22,93 juta orang, menurun 0,43 juta orang terhadap September 2025 dan menurun 0,92 juta orang terhadap Maret 2025.
- Persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2026 sebesar 6,34 persen, turun dibandingkan September 2025 yang sebesar 6,60 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2026 sebesar 10,67 persen, menurun dibandingkan September 2025 yang sebesar 10,72 persen.
- Dibanding September 2025, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2026 berkurang sebanyak 0,35 juta orang (dari 11,18 juta orang pada September 2025 menjadi 10,83 juta orang pada Maret 2026). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di perdesaan berkurang sebanyak 0,08 juta orang (dari 12,18 juta orang pada September 2025 menjadi 12,10 juta orang pada Maret 2026).
- Garis Kemiskinan pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp669.235,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp499.886,00 (74,70 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp169.349,00 (25,30 persen).

1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Maret 2015–Maret 2026

Secara umum, pada periode Maret 2015–Maret 2026, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada Maret 2020, September 2020, dan September 2022. Tingkat kemiskinan tertinggi selama periode tersebut tercatat pada Maret 2015, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 28,59 juta orang atau 11,22 persen. Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin pada September 2022 terjadi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan pada Maret dan September 2020 disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Kondisi ekonomi yang mulai pulih pasca pandemi sejalan dengan perkembangan tingkat kemiskinan yang mulai berangsur turun dari Maret 2021 hingga Maret 2026. Perkembangan tingkat kemiskinan pada periode Maret 2015 hingga Maret 2026 ditampilkan pada Gambar 1.



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2015–Maret 2026

Gambar 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2015–Maret 2026

2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Maret 2025–Maret 2026

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 mencapai 22,93 juta orang. Dibandingkan September 2025, jumlah penduduk miskin menurun 0,43 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2025, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,92 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,07 persen, menurun 0,18 persen poin terhadap September 2025 dan menurun 0,40 persen poin terhadap Maret 2025.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2025–Maret 2026, jumlah penduduk miskin perkotaan menurun sebesar 0,35 juta orang sedangkan di perdesaan turun sebesar 0,08 juta orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 6,60 persen menjadi 6,34 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 10,72 persen menjadi 10,67 persen.

Tabel 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2025–Maret 2026

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2025	11,27	6,73
September 2025	11,18	6,60
Maret 2026	10,83	6,34
Perdesaan		
Maret 2025	12,58	11,03
September 2025	12,18	10,72
Maret 2026	12,10	10,67
Total		
Maret 2025	23,85	8,47
September 2025	23,36	8,25
Maret 2026	22,93	8,07

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, September 2025, dan Maret 2026

3. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau pada Maret 2026

Tabel 2 menunjukkan persentase dan jumlah penduduk miskin menurut pulau pada Maret 2026. Terlihat bahwa persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 18,06 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 4,94 persen. Namun demikian, dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa (12,02 juta orang), sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan (0,87 juta orang).

Tabel 2 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau, Maret 2026

Pulau	Persentase Penduduk Miskin (%)			Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera	6,63	9,01	7,90	1,96	3,04	5,00
Jawa	6,54	10,15	7,60	7,30	4,72	12,02
Bali dan Nusa Tenggara	6,83	15,70	11,24	0,56	1,27	1,83
Kalimantan	4,02	5,91	4,94	0,36	0,51	0,87
Sulawesi	5,05	11,31	8,52	0,47	1,30	1,77
Maluku dan Papua	6,04	25,14	18,06	0,18	1,26	1,44
Indonesia	6,34	10,67	8,07	10,83	12,10	22,93

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2026

4. Perkembangan Garis Kemiskinan, Maret 2025–Maret 2026

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel 3 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada Maret 2025 sampai dengan Maret 2026.

Tabel 3 Garis Kemiskinan dan Perkembangannya Menurut Daerah, Maret 2025–Maret 2026

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Maret 2025	463.801	165.760	629.561
September 2025	489.412	173.669	663.081
Maret 2026	512.099	180.807	692.906
Perubahan Mar'25–Mar'26(%)	10,41	9,08	10,06
Perubahan Sep'25–Mar'26(%)	4,64	4,11	4,50
Perdesaan			
Maret 2025	441.494	138.855	580.349
September 2025	464.492	145.765	610.257
Maret 2026	483.081	152.091	635.172
Perubahan Mar'25–Mar'26(%)	9,42	9,53	9,45
Perubahan Sep'25–Mar'26(%)	4,00	4,34	4,08
Total			
Maret 2025	454.299	154.861	609.160
September 2025	478.955	162.488	641.443
Maret 2026	499.886	169.349	669.235
Perubahan Mar'25–Mar'26(%)	10,03	9,36	9,86
Perubahan Sep'25–Mar'26(%)	4,37	4,22	4,33

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, September 2025, dan Maret 2026

Garis Kemiskinan pada Maret 2026 adalah sebesar Rp669.235,00 per kapita per bulan. Dibandingkan September 2025, Garis Kemiskinan naik sebesar 4,33 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2025, terjadi kenaikan sebesar 9,86 persen.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat pada Tabel 4 bahwa peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2026 di perkotaan sebesar 73,91 persen dan di perdesaan sebesar 76,06 persen.

Pada Maret 2026, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar, yakni sebesar 20,52 persen di perkotaan dan 24,60 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (10,83 persen di perkotaan dan 10,18 persen di perdesaan). Komoditas yang memberikan sumbangan besar terhadap GK berikutnya adalah telur ayam ras (4,69 persen di perkotaan dan 3,73 persen di perdesaan), daging ayam ras (4,42 persen di perkotaan dan 3,08 persen di perdesaan), kopi bubuk & kopi instan (sachet) (2,48 persen di perkotaan dan 2,36 persen di perdesaan), mie instan (2,44 persen di perkotaan dan 2,09 persen di perdesaan), dan seterusnya. Komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar, baik pada GK perkotaan dan perdesaan, adalah perumahan (9,13 persen di perkotaan dan 9,17 persen di perdesaan), bensin (2,97 persen di perkotaan dan 2,95 persen di perdesaan), dan listrik (2,78 persen di perkotaan dan 1,63 persen di perdesaan). Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Daftar Komoditas yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (persen), Maret 2026

Jenis Komoditas	Perkotaan	Jenis Komoditas	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan:	73,91	Makanan:	76,06
Beras	20,52	Beras	24,60
Rokok kretek filter	10,83	Rokok kretek filter	10,18
Telur ayam ras	4,69	Telur ayam ras	3,73
Daging ayam ras	4,42	Daging ayam ras	3,08
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,48	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,36
Mie instan	2,44	Gula pasir	2,32
Roti	2,31	Bawang merah	2,17
Kue basah	1,98	Mie instan	2,09
Bawang merah	1,92	Roti	1,97
Kue kering/biskuit	1,78	Cabe rawit	1,80
Tempe	1,75	Tongkol/tuna/cakalang	1,72
Tahu	1,70	Kue basah	1,71
Lainnya	17,09	Lainnya	18,33
Bukan Makanan:	26,09	Bukan Makanan:	23,94
Perumahan	9,13	Perumahan	9,17
Bensin	2,97	Bensin	2,95
Listrik	2,78	Listrik	1,63
Pendidikan	1,90	Pendidikan	1,20
Perlengkapan mandi	1,26	Perlengkapan mandi	1,18
Kesehatan	0,82	Sabun cuci	0,76
Perawatan kulit, muka, kuku, rambut	0,78	Perawatan kulit, muka, kuku, rambut	0,73
Lainnya	6,45	Lainnya	6,32

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2026

5. Garis Kemiskinan per Rumah Tangga Miskin, Maret 2026

Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata-rata, Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin pada Maret 2026 adalah sebesar Rp3.091.866,00/bulan, naik sebesar 1,26 persen dibanding kondisi September 2025 yang sebesar Rp3.053.269,00/bulan.

Tabel 5 Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin, September 2025 dan Maret 2026

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Miskin	Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin (Rp/rumah tangga/bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)
September 2025	641.443	4,76	3.053.269
Maret 2026	669.235	4,62	3.091.866
Perubahan September 2025–Maret 2026 (%)	4,33	-2,94	1,26

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), September 2025 dan Maret 2026

6. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan, Maret 2025–Maret 2026

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada Maret 2026, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) sebesar 1,268, menurun dibandingkan September 2025 yang sebesar 1,290 dan Maret 2025 yang sebesar 1,365. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) pada Maret 2026 sebesar 0,291, turun dibandingkan September 2025 yang sebesar 0,303 dan Maret 2025 yang sebesar 0,319 (lihat Tabel 6).

Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2026, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) untuk perkotaan sebesar 0,951 sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 1,744. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2), di perkotaan nilainya sebesar 0,209 sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,414.

Tabel 6 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2025–Maret 2026

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)			
Maret 2025	1,061	1,811	1,365
September 2025	1,040	1,661	1,290
Maret 2026	0,951	1,744	1,268
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)			
Maret 2025	0,245	0,427	0,319
September 2025	0,245	0,390	0,303
Maret 2026	0,209	0,414	0,291

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, September 2025, dan Maret 2026

7. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Maret 2026 antara lain adalah:

1. Perekonomian Indonesia pada Triwulan I-2026 tumbuh sebesar 5,61 persen (*y-on-y*).
2. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Triwulan I-2026 tercatat sebesar Rp1.838,2 triliun, meningkat 2,88 persen dibandingkan Triwulan III-2025 dan meningkat 5,52 persen dibandingkan Triwulan I-2025.
3. Sepanjang Februari 2025–Februari 2026 terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,90 juta orang.
4. Pada Februari 2026, jumlah penduduk bekerja pada kegiatan formal mencapai 59,93 juta orang atau 40,58 persen, turun 0,02 persen poin dibandingkan Februari 2025.
5. Tingkat setengah pengangguran pada Februari 2026 menurun sebesar 0,73 persen poin dibandingkan Februari 2025.
6. Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen, turun 0,08 persen poin dibandingkan Februari 2025.
7. Luas panen padi pada Februari 2026 sebesar 0,94 juta hektare, turun 16,81 persen dibanding September 2025 (1,13 juta hektare).
8. Produksi padi pada Februari 2026 mencapai 5,05 juta ton GKG, turun 16,08 persen dibandingkan September 2025 yang sebesar 5,97 juta ton.
9. Realisasi penyaluran PKH sampai Triwulan I-2026 sebesar 97,10 persen atau sebanyak 9,70 juta KPM dan bantuan sembako sebesar 95,99 persen atau sebanyak 17,51 juta keluarga. (Sumber: Kemenko PM)

8. Penjelasan Teknis dan Sumber Data

1. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan.
2. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.
3. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
4. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan.
5. Garis Kemiskinan per rumah tangga dihitung dari Garis Kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin.
6. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
7. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan Maret 2026 adalah data Susenas Konsumsi dan Pengeluaran Maret 2026. Adapun pendataan Susenas Maret 2026 dilakukan pada Februari 2026. Hal ini dikarenakan bulan Maret 2026 bertepatan dengan bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri yang dapat memengaruhi pola konsumsi rumah tangga.

Tabel 7 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi, September 2025 dan Maret 2026

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)					
	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	Sep'25	Mar'26	Sep'25	Mar'26	Sep'25	Mar'26
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Aceh	168,77	173,56	534,56	540,22	703,33	713,78
2. Sumatera Utara	648,75	644,92	479,31	465,45	1.128,06	1.110,37
3. Sumatera Barat	115,18	118,68	197,12	192,46	312,30	311,14
4. Riau	171,03	161,49	304,54	309,31	475,57	470,80
5. Jambi	117,84	116,16	143,41	137,57	261,25	253,73
6. Sumatera Selatan	310,56	297,24	587,68	572,73	898,24	869,97
7. Bengkulu	94,51	91,49	155,69	158,62	250,19	250,11
8. Lampung	229,09	228,54	631,04	603,35	860,13	831,89
9. Kepulauan Bangka Belitung	33,31	33,09	41,35	41,53	74,65	74,61
10. Kepulauan Riau	94,77	91,68	19,79	19,54	114,55	111,22
11. DKI Jakarta	439,12	432,62	-	-	439,12	432,62
12. Jawa Barat	2.826,25	2.701,64	724,46	734,84	3.550,71	3.436,48
13. Jawa Tengah	1.740,48	1.672,30	1.604,34	1.613,14	3.344,82	3.285,43
14. DI Yogyakarta	319,12	307,30	103,67	101,57	422,79	408,87
15. Jawa Timur	1.637,78	1.584,81	2.166,50	2.127,42	3.804,29	3.712,23
16. Banten	615,02	606,11	145,84	140,63	760,85	746,73
17. Bali	106,07	107,26	54,02	54,75	160,09	162,01
18. Nusa Tenggara Barat	349,94	340,43	287,24	288,06	637,18	628,50
19. Nusa Tenggara Timur	112,54	109,82	919,15	927,83	1.031,69	1.037,64
20. Kalimantan Barat	90,28	91,83	232,27	221,54	322,54	313,37
21. Kalimantan Tengah	62,26	63,30	79,50	83,41	141,75	146,71
22. Kalimantan Selatan	67,37	65,71	101,44	99,70	168,81	165,41
23. Kalimantan Timur	116,95	113,41	85,09	87,23	202,04	200,64
24. Kalimantan Utara	29,73	27,75	12,73	12,80	42,45	40,54
25. Sulawesi Utara	58,28	57,05	113,86	107,73	172,13	164,78
26. Sulawesi Tengah	71,84	75,22	273,53	269,83	345,38	345,06
27. Sulawesi Selatan	232,01	210,43	453,13	459,20	685,14	669,63
28. Sulawesi Tenggara	81,03	76,09	214,27	217,38	295,31	293,47
29. Gorontalo	25,88	25,20	129,88	125,40	155,76	150,60
30. Sulawesi Barat	23,86	24,64	126,02	123,42	149,88	148,06
31. Maluku	41,13	34,46	245,73	247,08	286,86	281,54
32. Maluku Utara	22,91	24,25	51,90	53,61	74,81	77,85
33. Papua Barat	16,16	13,87	86,25	84,60	102,40	98,46
34. Papua Barat Daya	24,02	26,67	78,39	70,85	102,41	97,51
35. Papua	33,01	33,93	127,24	132,04	160,25	165,98
36. Papua Selatan	9,92	7,21	94,00	93,41	103,92	100,61
37. Papua Tengah	20,42	11,23	289,44	310,05	309,86	321,28
38. Papua Pegunungan	26,10	27,26	282,09	272,80	308,19	300,06
Indonesia	11.183,28	10.828,65	12.176,43	12.101,09	23.359,71	22.929,74

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2025 dan Maret 2026

Tabel 8 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, September 2025 dan Maret 2026

Provinsi		Persentase Penduduk Miskin (%)					
		Perkotaan		Perdesaan		Total	
		Sep'25	Mar'26	Sep'25	Mar'26	Sep'25	Mar'26
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Aceh	8,15	8,27	14,51	14,66	12,22	12,34
2.	Sumatera Utara	7,16	7,05	7,35	7,17	7,24	7,10
3.	Sumatera Barat	3,75	3,82	7,03	6,88	5,31	5,27
4.	Riau	5,61	5,26	6,76	6,83	6,30	6,19
5.	Jambi	9,25	9,07	5,70	5,45	6,89	6,67
6.	Sumatera Selatan	8,91	8,48	10,43	10,13	9,85	9,50
7.	Bengkulu	13,23	12,73	11,19	11,37	11,88	11,83
8.	Lampung	7,37	7,28	10,88	10,41	9,66	9,31
9.	Kepulauan Bangka Belitung	3,59	3,53	6,50	6,54	4,77	4,75
10.	Kepulauan Riau	3,85	3,68	8,70	8,65	4,26	4,09
11.	DKI Jakarta	4,03	3,96	-	-	4,03	3,96
12.	Jawa Barat	6,66	6,32	7,28	7,48	6,78	6,54
13.	Jawa Tengah	8,99	8,59	9,87	9,96	9,39	9,21
14.	DI Yogyakarta	9,99	9,55	10,37	10,18	10,08	9,70
15.	Jawa Timur	6,93	6,66	12,55	12,38	9,30	9,06
16.	Banten	5,35	5,21	6,27	6,23	5,51	5,38
17.	Bali	3,06	3,06	4,44	4,54	3,42	3,44
18.	Nusa Tenggara Barat	11,70	11,25	11,02	11,08	11,38	11,17
19.	Nusa Tenggara Timur	6,96	6,71	21,48	21,64	17,50	17,52
20.	Kalimantan Barat	4,29	4,32	7,05	6,72	5,97	5,78
21.	Kalimantan Tengah	4,84	4,86	5,02	5,27	4,94	5,09
22.	Kalimantan Selatan	2,91	2,81	4,58	4,50	3,73	3,63
23.	Kalimantan Timur	4,31	4,15	7,24	7,42	5,19	5,14
24.	Kalimantan Utara	5,86	5,42	4,72	4,73	5,47	5,18
25.	Sulawesi Utara	3,95	3,85	10,11	9,59	6,62	6,32
26.	Sulawesi Tengah	6,40	6,62	12,66	12,48	10,52	10,46
27.	Sulawesi Selatan	5,17	4,65	9,56	9,72	7,43	7,24
28.	Sulawesi Tenggara	6,65	6,17	12,66	12,83	10,14	10,02
29.	Gorontalo	4,46	4,30	19,86	19,24	12,62	12,16
30.	Sulawesi Barat	7,68	7,90	10,84	10,57	10,18	10,00
31.	Maluku	4,80	3,99	24,01	24,10	15,25	14,91
32.	Maluku Utara	5,71	6,00	5,54	5,69	5,59	5,79
33.	Papua Barat	9,60	8,14	24,32	23,71	19,58	18,68
34.	Papua Barat Daya	7,27	7,48	30,77	30,18	17,50	16,49
35.	Papua	5,85	6,09	38,00	38,19	17,82	18,39
36.	Papua Selatan	4,93	4,00	27,79	25,77	19,26	18,54
37.	Papua Tengah	6,54	4,18	39,14	39,37	29,45	30,41
38.	Papua Pegunungan	13,06	16,72	30,25	27,95	27,21	26,34
Indonesia		6,60	6,34	10,72	10,67	8,25	8,07

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2025 dan Maret 2026

Tabel 9 **Garis Kemiskinan per Kapita Menurut Provinsi dan Daerah, September 2025 dan Maret 2026**

Provinsi	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)					
	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	Sep'25	Mar'26	Sep'25	Mar'26	Sep'25	Mar'26
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Aceh	756.201	783.774	693.085	719.868	715.103	742.464
2. Sumatera Utara	755.041	783.980	671.746	690.747	718.220	743.301
3. Sumatera Barat	800.935	828.548	750.331	786.275	776.517	808.511
4. Riau	796.664	808.860	713.694	725.444	747.345	758.447
5. Jambi	812.016	849.779	664.895	693.544	713.849	744.065
6. Sumatera Selatan	654.169	674.243	582.407	603.188	609.044	628.228
7. Bengkulu	787.599	800.966	675.770	703.893	712.003	735.745
8. Lampung	680.646	708.693	610.729	631.717	634.062	657.467
9. Kepulauan Bangka Belitung	964.754	988.041	1.025.283	1.044.293	992.426	1.012.331
10. Kepulauan Riau	873.531	892.874	844.224	872.409	870.738	891.524
11. DKI Jakarta	897.768	925.525	-	-	897.768	925.525
12. Jawa Barat	578.501	614.642	563.380	590.122	575.499	609.790
13. Jawa Tengah	580.119	605.775	560.252	586.235	570.870	596.676
14. DI Yogyakarta	681.094	704.034	555.867	580.455	649.331	672.756
15. Jawa Timur	603.726	630.615	561.281	582.791	585.020	609.732
16. Banten	728.161	765.739	651.175	687.893	715.288	753.492
17. Bali	665.796	700.088	575.268	605.443	642.986	675.354
18. Nusa Tenggara Barat	593.069	627.931	555.647	583.338	575.856	606.951
19. Nusa Tenggara Timur	689.568	716.239	518.016	538.242	563.052	584.252
20. Kalimantan Barat	707.568	746.739	619.536	632.955	652.220	675.653
21. Kalimantan Tengah	671.568	707.784	693.943	734.090	683.664	723.149
22. Kalimantan Selatan	693.781	717.299	674.346	708.876	684.567	714.032
23. Kalimantan Timur	906.968	948.193	875.843	907.115	897.759	935.662
24. Kalimantan Utara	963.971	980.036	868.014	893.065	933.675	948.355
25. Sulawesi Utara	576.059	598.607	534.162	552.951	557.310	578.499
26. Sulawesi Tengah	673.254	693.745	660.157	680.675	664.691	685.244
27. Sulawesi Selatan	536.363	557.744	495.282	527.001	514.958	542.095
28. Sulawesi Tenggara	561.959	576.666	489.739	508.813	519.411	536.562
29. Gorontalo	526.930	542.685	512.138	527.985	519.640	535.255
30. Sulawesi Barat	505.691	516.088	512.203	520.285	510.846	519.404
31. Maluku	831.696	858.681	769.195	798.733	797.060	825.638
32. Maluku Utara	754.018	788.191	667.101	697.031	692.592	724.488
33. Papua Barat	1.020.087	1.038.279	806.356	844.986	868.631	909.502
34. Papua Barat Daya	883.292	898.362	820.016	831.427	855.657	871.495
35. Papua	807.291	857.366	604.835	639.224	736.720	773.455
36. Papua Selatan	743.064	782.742	498.316	521.049	587.264	615.015
37. Papua Tengah	1.059.833	1.122.713	803.138	835.883	873.843	905.417
38. Papua Pegunungan	1.546.609	1.602.080	1.186.901	1.229.735	1.235.328	1.275.343
Indonesia	663.081	692.906	610.257	635.172	641.443	669.235

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2025 dan Maret 2026

Tabel 10 Garis Kemiskinan per Rumah Tangga Miskin Menurut Provinsi dan Daerah, September 2025 dan Maret 2026

Provinsi	September 2025			Maret 2026		
	GK per Kapita	Rata-Rata Jumlah ART pada RT Miskin	GK per RT Miskin	GK per Kapita	Rata-Rata Jumlah ART pada RT Miskin	GK per RT Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Aceh	715.103	4,92	3.518.307	742.464	4,89	3.630.649
2. Sumatera Utara	718.220	5,16	3.706.015	743.301	5,30	3.939.495
3. Sumatera Barat	776.517	5,18	4.022.358	808.511	5,06	4.091.066
4. Riau	747.345	5,39	4.028.190	758.447	5,20	3.943.924
5. Jambi	713.849	4,98	3.554.968	744.065	4,80	3.571.512
6. Sumatera Selatan	609.044	4,89	2.978.225	628.228	4,67	2.933.825
7. Bengkulu	712.003	4,77	3.396.254	735.745	4,55	3.347.640
8. Lampung	634.062	4,56	2.891.323	657.467	4,56	2.998.050
9. Kepulauan Bangka Belitung	992.426	4,49	4.455.993	1.012.331	5,11	5.173.011
10. Kepulauan Riau	870.738	4,56	3.970.565	891.524	4,58	4.083.180
11. DKI Jakarta	897.768	5,10	4.578.617	925.525	4,89	4.525.817
12. Jawa Barat	575.499	4,51	2.595.500	609.790	4,38	2.670.880
13. Jawa Tengah	570.870	4,48	2.557.498	596.676	4,31	2.571.674
14. DI Yogyakarta	649.331	4,28	2.779.137	672.756	4,15	2.791.937
15. Jawa Timur	585.020	4,34	2.538.987	609.732	4,14	2.524.290
16. Banten	715.288	5,17	3.698.039	753.492	5,17	3.895.554
17. Bali	642.986	4,13	2.655.532	675.354	4,72	3.187.671
18. Nusa Tenggara Barat	575.856	4,37	2.516.491	606.951	4,02	2.439.943
19. Nusa Tenggara Timur	563.052	5,88	3.310.746	584.252	5,54	3.236.756
20. Kalimantan Barat	652.220	5,57	3.632.865	675.653	5,08	3.432.317
21. Kalimantan Tengah	683.664	4,62	3.158.528	723.149	4,82	3.485.578
22. Kalimantan Selatan	684.567	5,10	3.491.292	714.032	4,51	3.220.284
23. Kalimantan Timur	897.759	5,14	4.614.481	935.662	5,12	4.790.589
24. Kalimantan Utara	933.675	6,30	5.882.153	948.355	6,11	5.794.449
25. Sulawesi Utara	557.310	5,54	3.087.497	578.499	5,23	3.025.550
26. Sulawesi Tengah	664.691	5,40	3.589.331	685.244	5,38	3.686.613
27. Sulawesi Selatan	514.958	5,03	2.590.239	542.095	5,21	2.824.315
28. Sulawesi Tenggara	519.411	6,04	3.137.242	536.562	5,46	2.929.629
29. Gorontalo	519.640	5,43	2.821.645	535.255	4,88	2.612.044
30. Sulawesi Barat	510.846	6,47	3.305.174	519.404	5,41	2.809.976
31. Maluku	797.060	6,46	5.149.008	825.638	6,23	5.143.725
32. Maluku Utara	692.592	6,42	4.446.441	724.488	5,63	4.078.867
33. Papua Barat	868.631	6,51	5.654.788	909.502	5,96	5.420.632
34. Papua Barat Daya	855.657	5,99	5.125.385	871.495	5,80	5.054.671
35. Papua	736.720	5,66	4.169.835	773.455	5,79	4.478.304
36. Papua Selatan	587.264	5,93	3.482.476	615.015	5,84	3.591.688
37. Papua Tengah	873.843	4,51	3.941.032	905.417	4,37	3.956.672
38. Papua Pegunungan	1.235.328	4,29	5.299.557	1.275.343	4,52	5.764.550
Indonesia	641.443	4,76	3.053.269	669.235	4,62	3.091.866

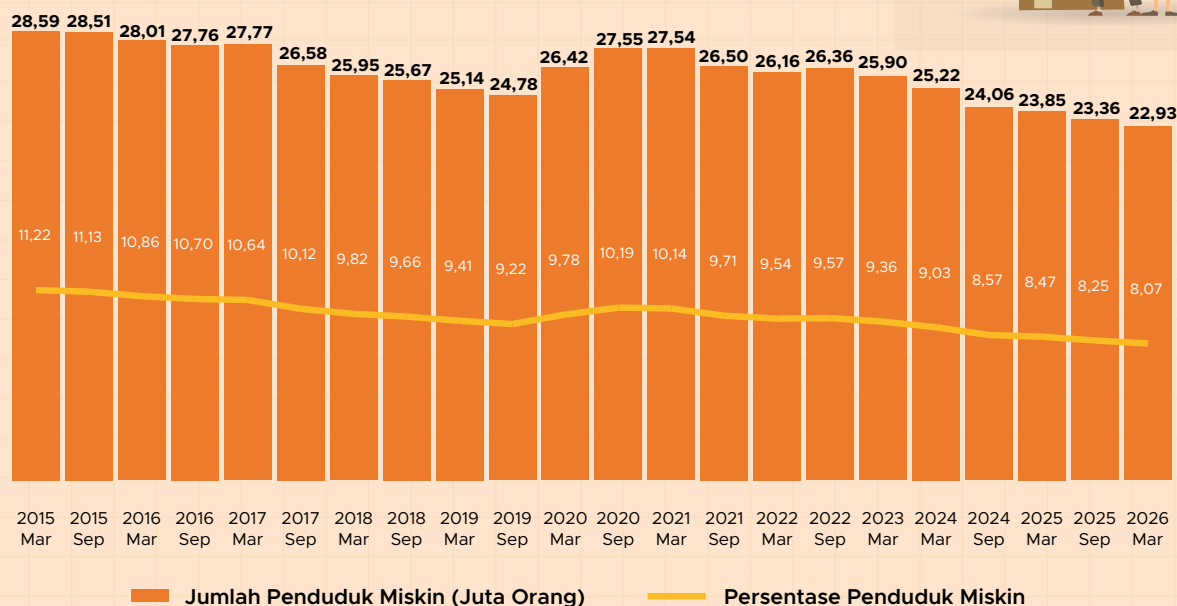
Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2025 dan Maret 2026

PROFIL KEMISKINAN DI INDONESIA, MARET 2026

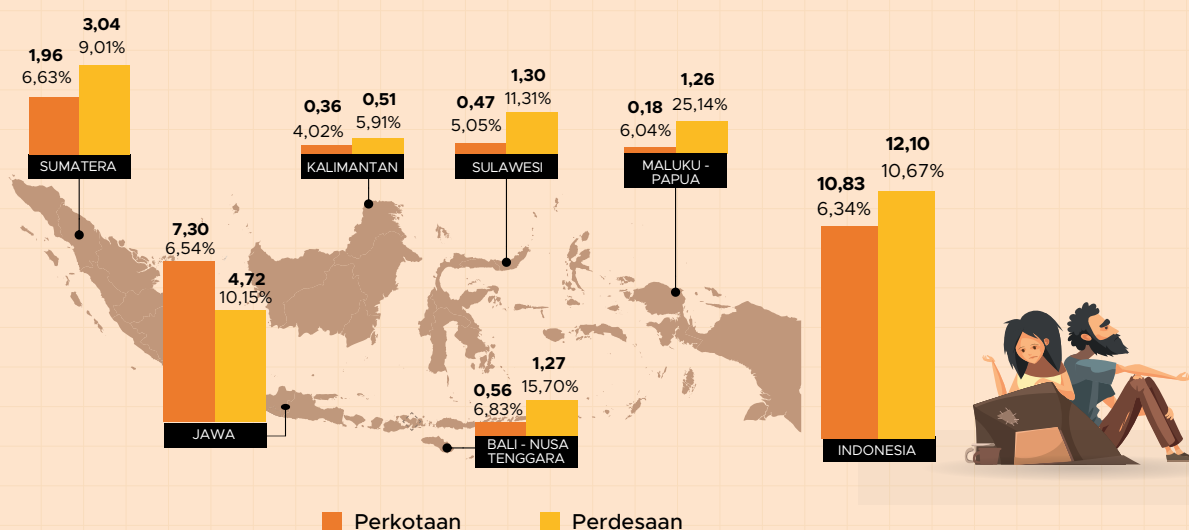
Berita Resmi Statistik No. 80/08/Th. XXIX, 5 Agustus 2026



Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2015–Maret 2026



Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Pulau, Maret 2026

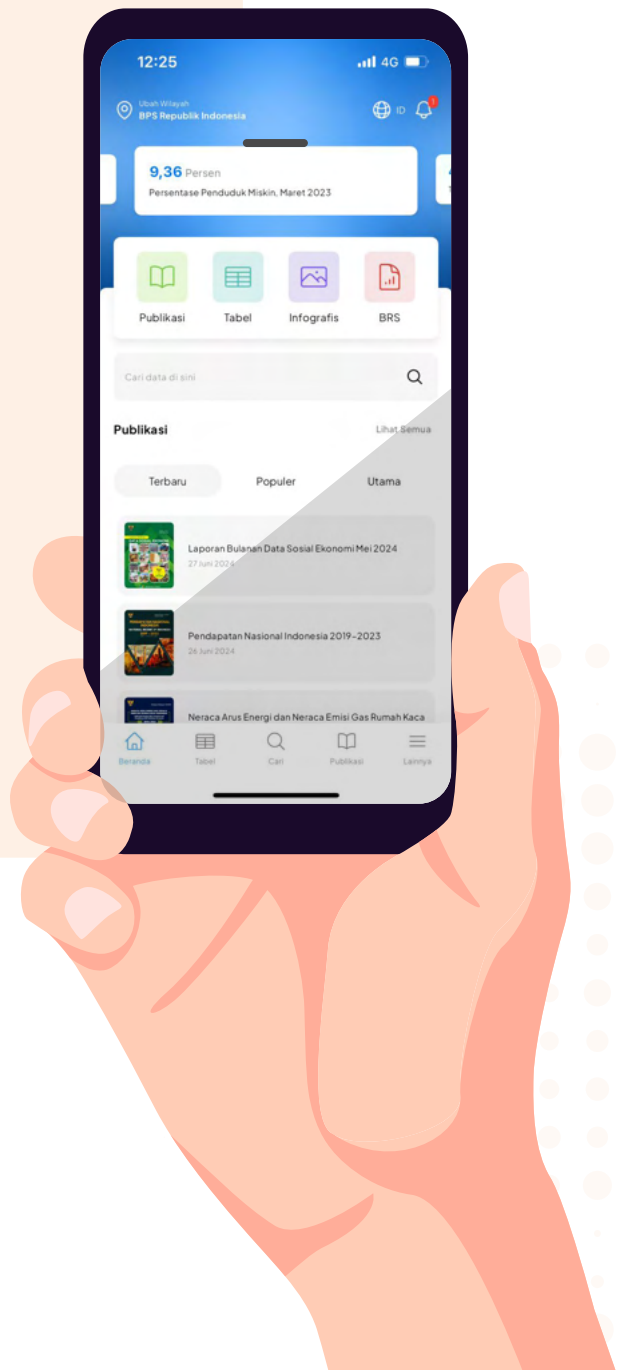


Gambar 2 Infografis Profil Kemiskinan di Indonesia, Maret 2026

AllStats BPS

untuk mengakses
data secara cepat di
gawai Anda

Publikasi, Berita Resmi Statistik,
Tabel Dinamis Data Series dan
Pelayanan Statistik Terpadu





Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi:



Dr. Budi Santoso, S.ST, M.Si.
Plt. Direktur Statistik Ketahanan Sosial

☎ (021) 3810291-4, Ext. 4300

✉ budis@bps.go.id

Untuk layanan perpustakaan, penjualan data mikro, publikasi elektronik, publikasi cetakan, dan peta digital wilayah kerja statistik sesuai peraturan yang berlaku maupun konsultasi statistik dapat menghubungi Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di pst.bps.go.id

Konten Berita Resmi Statistik dilindungi oleh Undang-Undang, hak cipta melekat pada Badan Pusat Statistik. Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsq@bps.go.id

